

PELAKSANAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK “SAD TO HAPPY” DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Azhari M. Hadi Putra¹, Aidinil Zetra², Roni Ekha Putera³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia

^{2,3}Magister Ilmu Politik, Fisip, Universitas Andalas, Indonesia

E-mail: kaisarapi@gmail.com; aidinilzetra@soc.unand.ac.id; roniekhaputera@soc.unand.ac.id

ABSTRAK. Masyarakat suku anak dalam (SAD) selama ini hidup marjinal, terpinggirkan karena pola hidup mereka yang masih nomaden di dalam hutan rimba Sumatera tengah. Sulit bagi mereka untuk dapat memenuhi standar kehidupan selayaknya warga negara Indonesia lainnya. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten yang menjadi wilayah sebaran SAD. Untuk itu pemerintah Kabupaten Dharmasraya memunculkan inovasi pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan yakni Suku Anak Dalam TerObos Hutan demi Administrasi kePendudukan kabuPaten dhamasraYa disingkat *SAD TO HAPPY*, sebagai upaya nyata menjalankan fungsi otonomi daerah dengan prinsip pelayanan masyarakat efektif dan efisien secara menyeluruh. Inovasi ini bertujuan agar pemerintah kabupaten dapat memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat SAD dengan cara pro aktif, yakni unsur pemerintah daerah yang bekerjasama dengan tokoh masyarakat sekitar dan juga Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan para aktivis peduli SAD, mendatangi langsung lokasi tempat tinggal masyarakat SAD yang ada diwilayah kabupaten Dharmasraya. Meski harus menerobos hutan rimba untuk dapat sampai ke lokasi domisili mereka, agar masyarakat SAD dengan keterbatasannya, tidak lagi harus bersusah payah datang ke pusat kabupaten untuk mendapatkan pelayanan administrasi penduduk. Penulisan jurnal ini bermaksud membahas lebih dalam bagaimana inovasi ini terlaksana, siapa pihak yang berperan dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan dengan Analisa mendalam terhadap sumber-sumber berita dan teori ilmiah yang ada, kesimpulan penulisan ini adalah bahwa inovasi SAD TO HAPPY telah berhasil menjangkau masyarakat SAD yang selama ini hidup marjinal, kemudian berhasil dilakukan perekaman dokumentasi kependudukan terhadap mereka sehingga mereka bisa menggunakannya untuk mendapatkan pelayanan publik.

Kata kunci: Masyarakat suku anak dalam (SAD), Inovasi, Pelayanan publik, Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICE INNOVATION "SAD TO HAPPY" IN DHARMASRAYA DISTRICT

ABSTRACT. The Suku Anak Dalam (SAD) community has been living marginally, marginalized because of their nomadic lifestyle in the jungles of Central Sumatra. It is difficult for them to be able to meet the standard of living of other Indonesian citizens. The government of Dhamasraya Regency is one of the districts where SAD is distributed. For this reason, the Dhamasraya Regency government has brought up public service innovations in the field of population administration, namely the Child Tribe in Forest Breaking for the sake of Population Administration in the DhamasraYa district, abbreviated as *SAD TO HAPPY*, as a real effort to carry out the function of regional autonomy with the principle of effective and efficient public service as a whole. This innovation aims to enable the district government to provide direct services to the SAD community in a pro-active way, namely elements of the local government working together with local community leaders and also non-governmental organizations (NGOs) with activists concerned with SAD, visiting directly the locations where the SAD people live. in the district of Dharmasraya. Even though they have to break through the jungle to get to their domicile location so that the SAD people with their limitations no longer have to bother coming to the district center to get population administration services. Writing this journal intends to discuss more deeply how this innovation is carried out, who is the party that plays a role, and what the implementation mechanism is. The research method used by the author is a literature study with an in-depth analysis of existing news sources and scientific theories, this writing concludes that the *SAD TO HAPPY* innovation has succeeded in reaching the SAD community who have been living on the margins, then successfully recorded population documentation on them so they can use it to get public services.

Key words: Indigenous Child Society (SAD), Innovation, Public Services, Regional Autonomy, Dhamasraya District Government.

PENDAHULUAN

Sudah lebih 70 tahun sejak negara Indonesia merdeka, ternyata hingga saat ini masih ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelompok masyarakat ini biasa disebut masyarakat marjinal, Masyarakat marjinal di Indonesia yang terpinggirkan ini menghadapi keadaan yang kompleks dan sulit. Mereka adalah kelompok etnis yang tinggal di daerah terpencil yang jauh dari pusat kota dengan akses terbatas terhadap sumber daya dan layanan publik. Kehidupan mereka sering kali sangat berbeda dari kebanyakan orang di sekitar mereka dan cara hidup mereka didasarkan pada kedekatan dengan alam dan identitas budaya yang kuat. Menurut Samandawai, masyarakat marginal/ grassroot (akar rumput) adalah masyarakat lapisan terbawah yang mengalami masalah kemiskinan dan pengucilan dan tidak memiliki akses terhadap pasar tenaga kerja, tanah, distribusi produk dan hak-hak tertentu (Wijayanti 2019)

Salah satu permasalahan yang terkait dengan masyarakat marjinal di Indonesia adalah persoalan data kependudukan, terutama dari segi identifikasi akurasi dalam pengumpulan dan pemeliharaan data kependudukan terhadap mereka (Syahid 2015). Sistem pencatatan kependudukan yang biasa digunakan oleh pemerintah sering kali tidak mampu mencatat secara akurat, akumulasi masyarakat marjinal yang tinggal di daerah terpencil. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya data yang tepat tentang jumlah populasi, distribusi geografis, dan profil demografis masyarakat suku yang terlantar. Karena kurangnya data kependudukan yang akurat, masyarakat marjinal yang terpinggirkan seringkali kurang diperhatikan dalam kebijakan dan program pembangunan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan, ketimpangan dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik dan perlindungan hak-hak dasar warga negara lainnya.

Sudah banyak tulisan ilmiah terkait tentang administrasi kependudukan, diantara-Nya tulisan dari Martadala yang membahas rancangan administrasi kependudukan dengan menggunakan perangkat teknologi informasi sebagai langkah awal pengembangan desa cerdas (Martadala et al.

2021), kemudian tulisan Anggraeni yang membahas mengenai evaluasi penggunaan Aplikasi Berkas Mlaku Dewe (BMW) dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang didukung teknologi informasi dan komunikasi (Anggraeni and Rahaju 2022). Selain itu juga masih banyak tulisan ilmiah terkait data kependudukan yang membahas tentang pelaksanaan pendataan kependudukan dari segi teknologi informasi, terutama dalam lima tahun terakhir ini. Namun, sedikit peneliti yang menulis tentang inovasi pelayanan administrasi kependudukan secara langsung bagi masyarakat marjinal oleh pemerintah daerah, disinilah peranan tulisan ini dalam memperkaya kajian kebijakan administrasi kependudukan.

Untuk mengatasi masalah administrasi kependudukan ini, penting upaya meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pendataan penduduk (Muhimah 2022). Pemerintah harus mengambil pendekatan yang pro aktif dan inklusif untuk mengidentifikasi, mengumpulkan dan memantau data kependudukan warga negara yang akurat. Kolaborasi dengan masyarakat marjinal terkait dan organisasi masyarakat sipil juga diperlukan untuk memastikan tersedianya data kependudukan yang tepat dan komprehensif untuk menginformasikan kebijakan dan program relevan demi kepentingan warga negara keseluruhan.

Upaya pemerintah Indonesia semakin gencar dalam pelayanan masyarakat, sejak dicetuskannya otonomi daerah. Melalui otonomi daerah yang bertujuan memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat terutama didaerah, sesuai amanat undang-undang pemerintahan daerah No. 32 tahun 2004. Maka setiap pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah ditingkat kabupaten/kota diberikan kewenangan dalam mengatur atau mengurus rumah tangganya secara mandiri, dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang ada serta memanfaatkan partisipasi aktif dari masyarakat (Anon n.d.-b), oleh karena itu sejatinya setiap pemerintah daerah yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib memberikan memberikan pelayanan publik prima yang dapat menyentuh masyarakat didaerah terkait secara menyeluruh.

Tanggungjawab otonomi daerah ini semestinya mendorong setiap pemerintah daerah untuk kreatif memunculkan inovasi pelayanan publik dalam pelaksanaan kebijakan, tingkat kebutuhan masyarakat daerah yang terus berkembang seiring laju pertumbuhan populasi dan perkembangan dari berbagai aspek terutama aspek sosial, ekonomi, politik bahkan dampak globalisasi pastinya akan mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat daerah, sehingga pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan dan pemegang kekuasaan seharusnya dapat menjawab tantangan perkembangan ini dengan terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, terutama melalui inovasi-inovasi baru guna memberikan jaminan pelayanan publik yang efektif dan efisien terhadap masyarakat daerah sesuai amanat undang-undang.

Berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, Negara Kesatuan Republik Indonesia pada prinsipnya wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap pembentukan status pribadi dan status hukum sehubungan dengan kependudukan dan peristiwa penting yang dialami Penduduk Indonesia (Anon n.d.-c). Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional melalui sistem database yang diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak administratif penduduk dalam pelayanan publik, serta melindungi penerbitan dokumen kependudukan tanpa perlakuan diskriminatif melalui peran aktif baik pemerintah maupun pemerintah daerah. Penerapan kebijakan administrasi kependudukan ini bermuara pada Rekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat E-KTP, sebagai identitas kependudukan yang merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat dan mendukung keakuratan pengembangan database kependudukan, di tingkat kabupaten atau kota sampai dengan tingkat nasional secara menyeluruh di wilayah NKRI.

Merujuk pada penjelasan diatas dapat dengan jelas kita pahami pentingnya administrasi kependudukan yang terdata secara akurat serta terdokumentasi melalui perekaman identitas elektronik (E-KTP), merupakan sebuah kewajiban oleh pemerintah di setiap tingkatan termasuk pemerintah kabupaten/kota yang ada di negara ini, untuk mendata setiap warga negara di wilayah

NKRI, pertanyaan yang kemudian muncul yakni apakah setiap warga negara Indonesia (WNI) yang ada dan memenuhi syarat di seluruh wilayah NKRI, sudah berhasil terdata secara administrasi dan memiliki dokumentasi kependudukan? Jawaban cepat dan tepat adalah belum!

Kebijakan inovatif dalam upaya pelayanan publik menjadi sebuah tantangan krusial bagi setiap pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya masing-masing, pemerintah daerah yang sanggup menjawab tantangan inovasi ini dengan menetapkan kebijakan-kebijakan lokal kreatif pro rakyat, akan menjadi pemerintah daerah yang terdepan dalam pelaksanaan otonomi daerah karena mampu mengemban amanat undang-undang, sebaliknya pemerintah daerah yang cenderung monoton, lamban merespon perkembangan kebutuhan masyarakat daerah dan tidak kreatif berinovasi meningkatkan pelayanan publik, dapat dikategorikan sebagai pemerintah daerah yang gagal dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Banyak persoalan yang menghambat upaya pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan ini dan setiap daerah pastinya memiliki bentuk permasalahan yang berbeda-beda, demikian juga di kabupaten Dharmasraya, terdapat persoalan yang menghambat proses pendataan administrasi kependudukan ini untuk dapat menjangkau seluruh penduduk di kabupaten tersebut, namun justru hambatan inilah menjadi bagian tantangan otonomi daerah seperti dijelaskan di awal pembahasan bab ini yang mesti dijawab dengan inovasi kreatif demi mewujudkan amanat undang-undang pemerintahan daerah. Inovasi kebijakan pemerintah daerah yang terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dapat kita jumpai di kabupaten Dharmasraya provinsi Sumatera Barat

Penduduk asli SAD adalah kelompok etnis minoritas yang tinggal di Sumatera bagian tengah, termasuk Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. SAD merupakan komunitas yang masih dalam tahap “berburu dan meramu”, yang sangat bergantung pada Sumber Daya Alam, khususnya hutan, dan hidup secara nomaden. hilangnya hutan di Sumatera telah memperumit kehidupan SAD (Ghufran 2022). Pola kehidupan sosial komunitas

masyarakat SAD yang nomaden di dalam rimba Sumatera tengah, tidak dapat dipungkiri menjadi hambatan upaya pendataan administrasi kependudukan, sulitnya menemui dan berkomunikasi dengan mereka, keterbatasan akses untuk menjangkau lokasi tempat tinggal komunitas masyarakat SAD, menjadi beberapa faktor penghambat upaya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah.

Kondisi ini tidak membuat pemerintah daerah kabupaten Dharmasraya menyerah begitu saja dan membiarkan komunitas masyarakat SAD hidup marginal tanpa mendapat pelayanan publik dari pemerintah melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) selaku satuan kerja yang membidangi administrasi kependudukan melakukan inovasi pelayanan publik dengan nama Suku Anak Dalam Terobos Hutan demi Administrasi kePendudukan kabuPaten dhamasraYa disingkat (*SAD TO HAPPY*) (Anon n.d.-a). Tulisan ini menggunakan analisa Konsep keadilan oleh Amartya Sen, menurutnya keadilan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dasar dari kehidupan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan rasa aman. Ketika kebutuhan dasar tersebut dapat terpenuhi maka mereka bisa menyatakan pendapat, berserikat, dan ikut dalam organisasi politik (Kartikasari and Priambodo 2020). Oleh sebab itu, data kependudukan dalam hal ini merupakan sarana fasilitas untuk mencakup indikator kebutuhan dasar manusia selaku warga negara seperti pendidikan, kesehatan, akses terhadap pekerjaan, dan partisipasi politik. Menurutnya juga, kesejahteraan yang sebenarnya tidak hanya tergantung pada tingkat pendapatan, tetapi juga pada kesempatan yang dimiliki individu untuk mengembangkan dan menggunakan kemampuan mereka.

Konsep *SAD TO HAPPY* yang dijalankan DISDUKCAPIL kabupaten Dharmasraya adalah dengan turun lapangan langsung mendatangi lokasi tempat tinggal komunitas masyarakat SAD, yang masuk dalam wilayah administrasi pemerintah kabupaten Dharmasraya untuk melakukan pendataan kependudukan secara langsung terhadap komunitas masyarakat SAD tersebut. Sehingga komunitas masyarakat SAD tidak perlu bersusah payah mendatangi kantor DISDUKCAPIL demi mendapatkan dokumen kependudukan, nantinya

dokumentasi kependudukan resmi akan membantu proses penyaluran pelayanan publik lainnya bagi masyarakat SAD, seperti bantuan sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan hingga penggunaan hak politik sebagai warga negara. Sebagaimana konsep keadilan telah menyebutkannya

Berdasarkan jabaran dan asumsi diatas, maka timbul rumusan masalah yakni bagaimana mekanisme pelaksanaan inovasi pelayanan public *SAD TO HAPPY*?. Penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah untuk mengembangkan pelaksanaan akurasi database kependudukan secara nasional, karena masih banyak masyarakat terpencil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti; Suku Dayak di Kalimantan, suku Badui di Jawa Barat, dan masyarakat Papua. Oleh karena itu, secara khusus, pemerintah daerah terkait dapat menerapkan inovasi pendataan kependudukan yang efektif dan efisien. Selain itu, penulisan artikel ini juga dapat memberikan gambaran tentang masyarakat adat terpencil yang masih hidup dalam kondisi yang belum layak di era peradaban dan teknologi saat ini dan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan secara global, serta mendorong peneliti lain untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan masyarakat adat terpencil.

KERANGKA PEMIKIRAN



Diagram 1. Konsep Keadilan

Berdasarkan konsep keadilan yang memberikan hak kesejahteraan bagi setiap personal melalui indikator kebutuhan dasar terkait, maka untuk mendapatkannya sebagai seorang warga negara, dibutuhkan data administratif yang terdokumentasi secara baik dan menyeluruh bagi setiap individu, termasuk masyarakat SAD. Namun begitu, kondisi

masyarakat SAD yang marjinal dibanding warga negara pada umumnya menyebabkan akses terhadap hak kesejahteraan tersebut tidak mampu didapatkan oleh mereka. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Dharmasraya selaku pihak berwenang, menciptakan inovasi SAD TO HAPPY untuk menjangkau masyarakat SAD dengan keterbatasan yang dimiliki guna memberikan layanan perekaman data kependudukan secara langsung kepada mereka, sehingga akses pelayanan publik dalam upaya memberikan hak kesejahteraan masyarakat SAD di kabupaten Dharmasraya dapat terwujud.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan metode kualitatif deskriptif analisis. Menurut Wayan Ardhana, penelitian kualitatif sangat berfokus dan mengarah pada pemahaman (understanding) tentang apa yang disajikan dalam bentuk nalar di dunia pemaknaan, pelaku dapat berupa frame atau pola ide-ide spesifik, dasar pemikiran tertentu, etika tertentu, isu-isu tertentu atau nilai-nilai budaya (Ardhana 2002). Oleh karena itu, penulis menganggap metode ini cocok untuk pokok bahasan yang dibahas yaitu pemikiran dasar berupa inovasi pembuatan kebijakan. Untuk alasan teknologi data, metode analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan data dan informasi yang didapat serta menekankan perhatian pada fenomena atau masalah nyata melalui pengumpulan data, penyusunan, pengolahan dan penarikan kesimpulan. Semua hasilnya akan di upayakan untuk menggambarkan situasi empiris yang objektif tentang fenomena atau masalah yang sedang dikaji.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dalam kaitannya dengan kajian teori dan berbagai referensi yang tidak dapat dipisahkan dari literatur ilmiah (Persada 2015). Rujukan penelitian literatur yang terkait dengan artikel Ini adalah upaya penulis untuk mencari, mengumpulkan, dan meneliti bahan tertulis berupa buku, artikel majalah, berita online dan konvensional, serta website lembaga publik terkait kebijakan pelayanan publik dibidang

kependudukan. Bahan kajian artikel ini berupa pernyataan dan sikap pemangku kepentingan dalam rangkaian inovasi kebijakan pelayanan publik "SAD TO HAPPY" berasal dari sumber-sumber tertulis ini. Analisis penulis terhadap kebijakan publik didasarkan pada pendekatan normatif, menekankan analisis kebijakan pendekatan normatif dengan langkah-langkah yang dihasilkan dari rekomendasi yang dapat mengatasi persoalan publik, pertanyaannya adalah bagaimana harus bertindak (apa yang seharusnya dilakukan?) dan jenis informasi yang dihasilkan bersifat preskriptif (Abdoellah and Rusfiana 2016). Data dianalisis kemudian dibandingkan dengan teori yang relevan. Data yang Dikumpulkan oleh Penulis ditelaah dengan teori yang relevan untuk dianalisis. metode berisi penjelasan tentang jenis penelitian/ desain penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Kebijakan SAD TO HAPPY

Pembahasan pertama yang penulis nilai perlu dijabarkan adalah pihak mana saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan SAD TO HAPPY, secara garis besar dapat penulis sampaikan bahwa pihak-pihak yang berperan diantaranya:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Peran Disdukcapil sebagai perwakilan dari pemerintah Kabupaten Dharmasraya pastinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan kedinasan yang membidangi administrasi kependudukan dari mulai database kependudukan hingga pengadaan dokumentasi kependudukan seperti kartu keluarga (KK) dan e-KTP oleh karena itu legalitas pendataan penduduk wajib diproses dan ditetapkan secara resmi oleh DISDUKCAPIL

2. Tokoh Masyarakat setempat

Dalam wilayah kabupaten Dharmasraya terdapat beberapa kecamatan dan nagari yang sering disinggahi oleh masyarakat SAD salah satunya paling sering ditemui di kecamatan Koto besar dan nagari Banai yang berjarak 3 jam berkendara ditambah 1 jam

berjalan kaki hingga sampai ke tempat tinggal beberapa orang komunitas masyarakat SAD, Dengan SAD To Happy, Disdukcapil Dharmasraya menggandeng pemerintah desa dan tokoh-tokoh adat setempat untuk memberikan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan bagi SAD, para tokoh masyarakat yang ada di kecamatan tersebut berperan dalam membantu memberikan fasilitas infrastruktur bagi para aktivis dan tim disdukcapil seperti tempat rapat koordinasi pun ikut mendukung program SAD TO HAPPY secara berkesinambungan. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Dharmasraya, Abdi Amri menjelaskan, bahwa untuk bertemu dengan “sanak”, sebutan komunitas SAD di kabupaten Dharmasraya. Tim mesti memiliki perantara yang sudah mereka anggap dekat dan kenal, di antaranya Kepala Jorong setempat. Dari 20 KK komunitas SAD yang bermukim di kawasan itu, 4 KK di antaranya dengan jumlah 6 orang tuntas dilakukan pendataan (Adi 2022).

3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM berperan dalam kebijakan SAD TO HAPPY melalui para aktivis atau relawan sosial yang bernaung dibawah-Nya, dalam hal ini para aktivis berperan sebagai narahubung antara disdukcapil dengan masyarakat SAD, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pola kehidupan masyarakat SAD yang nomaden dalam rimba bukit barisan menyebabkan akses untuk berkomunikasi bahkan untuk sekedar bertemu dengan mereka menjadi sangat sulit sehingga dibutuhkan upaya khusus untuk menjangkau keberadaan mereka.

Lebih dari itu, para aktivis memiliki peran yang sangat penting dalam menjalin hubungan komunikasi dengan masyarakat SAD dalam upaya memberikan pemahaman tentang perlunya administrasi kependudukan berikut fungsinya agar mereka secara sadar bersedia untuk melakukan perekaman dokumentasi kependudukan yang sudah disiapkan oleh disdukcapil, Oleh karenanya layanan jemput bola SAD TO Happy dilakukan dengan cara pendekatan persuasif dan partisipatif, dengan menggandeng pemerintah desa, tokoh-tokoh

adat setempat, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap SAD.

B. Mekanisme Pelaksanaan Inovasi Sad to Happy

Pada tahun 2019 pemerintah kabupaten Dharmasraya melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil selaku satuan kerja yang membidangi administrasi kependudukan melakukan inovasi pelayanan publik dengan nama Suku Anak Dalam TerObos Hutan demi Administrasi kePendudukan kabuPaten dhamasraYa disingkat (SAD TO HAPPY). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep SAD TO HAPPY yang dijalankan DISDUKCAPIL kabupaten Dharmasraya adalah dengan turun lapangan langsung mendatangi lokasi tempat tinggal komunitas masyarakat SAD yang masuk dalam wilayah administrasi pemerintah kabupaten Dharmasraya untuk melakukan pendataan kependudukan secara langsung terhadap komunitas masyarakat SAD tersebut, konsep inovasi ini muncul sebagai upaya nyata dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif dibidang administrasi kependudukan.

Melalui peran serta pihak-pihak terkait diatas dilangsungkanlah program SAD TO HAPPY dengan mekanisme kerjasama antar pihak-pihak terkait tersebut, diawali kebijakan pelayanan public oleh pemerintah kabupaten Dharmasraya yang ditindaklanjuti oleh disdukcapil dengan sarana dan prasarana administrasi kependudukan, kemudian diundanglah para LSM Bersama aktivis peduli SAD serta tokoh masyarakat Nagari banai dalam sebuah rapat koordinasi pembentukan tim kegiatan pelaksanaan program SAD TO HAPPY. Mekanisme kerjasama ini berjalan secara serentak dan bertahap dari segi waktu dimana tim yang terbentuk dari pihak-pihak terkait langsung bergerak menuju lokasi komunitas masyarakat SAD di kecamatan Koto besar dan Nagari Banai

Selanjutnya setelah sampai di lokasi dan berhasil menemui beberapa orang masyarakat SAD berdasarkan informasi dan sumberdaya geografis yang dimiliki oleh para aktivis dan tokoh masyarakat maka proses

perekaman dokumentasi dimulai dengan komunikasi antara tim dengan masyarakat SAD, jalinan komunikasi melalui para aktivis dan masyarakat SAD sejatinya telah terjalin karena program LSM dan aktivis peduli SAD sudah menyentuh mereka sejak lama seperti program Pendidikan dan penyerahan bantuan sosial yang bersifat swadaya sehingga sosialisasi tentang administrasi kependudukan dapat terlaksana lebih efektif dan dapat dilakukan perekaman administrasi kependudukan secara langsung ditempat tersebut

C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Inovasi Sad to Happy

Dalam upaya pelayanan SAD TO HAPPY, penulis mengidentifikasi ada dua faktor utama yang menghambat pelaksanaannya, yakni faktor pola sosial dan lokasi domisili masyarakat SAD

- Faktor pola sosial sebagaimana yang telah disinggung bahwa kehidupan masyarakat SAD yang marjinal masih sangat bergantung dengan pemanfaatan alam secara langsung menyebabkan perbedaan mendasar dalam menjalin komunikasi dengan mereka sehingga upaya pelayanan publik sulit dilakukan

- Faktor lokasi sebagaimana juga yang telah disampaikan bahwa pola hidup nomaden dalam rimba Sumatera tengah menyebabkan akses untuk menjangkau masyarakat SAD sangat sulit dilakukan dari segi jarak tempuh dan topografi serta tidak ada jaminan alamat tetap tempat tinggal mereka, faktor ini juga menyebabkan pendataan jumlah masyarakat SAD secara akurat dan menyeluruh tidak dapat dipastikan

D. Hasil

Pencapaian pelayanan publik SAD TO HAPPY memang belum sampai pada tahap maksimal, Bupati kabupaten Dharmasraya saat ini, Sutan Riska menyampaikan “Pada prinsipnya, inovasi ini dilahirkan untuk memudahkan warga SAD dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan, sehingga juga dapat memudahkan mereka untuk mendapatkan akses layanan dasar dari

pemerintah. Apakah itu layanan kesehatan, pendidikan, sosial, bahkan keikutsertaan dalam bidang politik, “ujar Sutan Riska usai presentasi waktu itu. Dikatakan bupati, dari total 77 jiwa warga SAD yang terdata ada di Kabupaten Dharmasraya, 29 jiwa diantara-Nya sudah memiliki dokumen administrasi kependudukan melalui inovasi SAD TO HAPPY yang dijalankan. Di antara mereka juga sudah ada yang mendapatkan BPJS, bantuan sosial, bahkan ikut serta memberikan hak suara dalam pemilihan umum pada tahun 2019 lalu (dms 2022),

Namun begitu, inovasi pelayanan publik SAD TO HAPPY telah membuka jalan bagi masyarakat SAD untuk mendapat hak kewarganegaraan dibidang administrasi kependudukan khususnya di kabupaten Dharmasraya. Melalui inovasi ini, karakteristik warga negara dalam upaya menuju kesejahteraan oleh pemerintah telah difasilitasi perwujudannya. Adanya perekaman data kependudukan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Dharmasraya untuk masyarakat SAD telah membuka akses mereka terhadap pelayanan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan hingga hak politik dapat dikatakan telah sesuai dengan konsep keadilan oleh Amartya Sen, bahwa data kependudukan harus mencakup indikator kebutuhan dasar manusia, seperti pendidikan, kesehatan, akses terhadap pekerjaan, dan partisipasi politik. Sehingga kesejahteraan yang sebenarnya juga bersumber pada kesempatan yang dimiliki individu untuk mengembangkan dan menggunakan kemampuan mereka dapat terlaksana.

Inovasi administrasi kependudukan ini juga suatu pencapaian bagi pemerintah kabupaten Dharmasraya dalam rangkaian pelaksanaan otonomi daerah sesuai amanat undang-undang sehingga dapat dikatakan pemerintah kabupaten Dharmasraya menjadi rolemode terdepan yang dapat dicontoh pemerintah daerah lainnya baik provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Inovasi pelayan publik SAD TO HAPPY juga berhasil mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi

(KEMENPAN RB) dalam Event TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik tingkat nasional dimana inovasi SAD TO HAPPY masuk salah satu dari 99 inovasi pelayanan publik yang dilakukan Lembaga negara dan pemerintah ditingkat nasional maupun daerah (Humas 2022), sekali lagi ini menjadi prestasi bagi pemerintah kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan otonomi daerah.

SIMPULAN

Inovasi SAD TO HAPPY ditujukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat SAD yang marjinal agar mendapat akses administrasi kependudukan serta dokumentasi resmi kependudukan sebagai warga negara Indonesia yang mana dengan dokumentasi resmi ini, SAD akan lebih mudah mendapatkan pelayanan publik seperti pelayanan Kesehatan (BPJS), bantuan sosial (BANSOS) hingga berhak turut serta dalam memberikan hak suara pada pemilu.

Pada kenyataannya inovasi ini memang belum mampu dirasakan oleh keseluruhan masyarakat SAD, meskipun begitu, inovasi ini telah menjadi pelopor pelayanan publik yang mampu menjangkau masyarakat marjinal dengan pola hidup nomaden dan berbeda dengan masyarakat umum lainnya yang sudah sejak lama mereka terpinggirkan dalam kehidupan bernegara, dengan inovasi ini terbukti mampu memberikan bukti nyata bahwa pelayanan publik oleh pemerintah kabupaten Dharmasraya, dalam hal data kependudukan dapat memberikan kemudahan akses terhadap fasilitas publik secara legal bagi masyarakat SAD selaku WNI.

Inovasi ini juga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat sebagai sebuah prestasi bagi pemerintah kabupaten Dharmasraya selaku pemerintah daerah dengan hak otonomi yang diamanatkan undang-undang dan sekaligus dapat menjadi rolemode bagi pemerintah daerah lainnya dibidang administrasi kependudukan terutama yang memiliki komunitas masyarakat marjinal diwilayahnya seperti masyarakat baduy di Jawa Barat, masyarakat Papua dan yang lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya ucapkan kepada keluarga besar Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas beserta rekan-rekan mahasiswa konsentrasi Tata Kelola Pemilu Batch VIII Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga kepada keluarga tercinta yang selalu mendukung dalam segala kondisi, tidak lupa pula kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, AY, and Y. Rusfiana. 2016. "Teori Analisis Dan Kebijakan Publik." (Query date: 2023-05-24 15:16:29).
- Adi, Ms. 2022. "Inovasi Pelayanan Publik, Suku Anak Dalam Antarkan Dharmasraya TOP 99." December 24.
- Anggraeni, A., and T. Rahaju. 2022. "Evaluasi Program Berkas Mlaku Dewe (Bmw) Pada Pelayanan Bidang Administrasi Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo." Publika (Query date: 2023-05-24 14:23:10).
- Anon. n.d.-a. "Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020."
- Anon. n.d.-b. "Undang-Undang No. 32 Tahun 2004."
- Anon. n.d.-c. "UU 24 TAHUN 2013."
- Ardhana, W. 2002. "Konsep Penelitian Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan Dan Pembelajaran." Malang: Universitas Negeri Malang (Query date: 2023-05-24 15:06:05).
- dms, hams. 2022. "Ngeriii, Sutan Riska Menuju Top45 Nasional." December 23.
- Ghufran, MM. 2022. EFEKTIVITAS PROGRAM "SAD TO HAPPY" DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL eprints.ipdn.ac.id.
- Humas, MenpanRB. 2022. "Sejahterakan Hidup Suku Anak Dalam Dengan SAD To Happy."
- Kartikasari, M., and B. Priambodo. 2020. "Tanggung Jawab Negara Dalam Mewujudkan Keadilan." The Indonesian

- Conference on ... (Query date: 2023-05-24 14:59:00).
- Martadala, DA, N. Neneng, ER Susanto, and ... 2021. "Model Desa Cerdas Dalam Pelayanan Administrasi (Studi Kasus: Desa Kotabaru Barat Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur)." *Jurnal Teknologi Dan ...* (Query date: 2023-05-24 14:18:07).
- Muhimah, Uum. 2022. "Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang_Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan." doi: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.
- Persada, GS. 2015. "Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R and D)." (Query date: 2023-05-24 15:13:24).
- Syahid, Ahmad. 2015. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARGINAL DI PERKOTAAN." <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/lbrmasy/issue/view/99>.
- Wijayanti, Asri. 2019. NASKAH AKADEMIS TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI KAUM MARGINAL. Surabaya: CV. REVKA PRIMA MEDIA.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license